



## **ANALISIS KAPABILITAS DINAMIS DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KOTA PALU**

**Muhammad Alfian<sup>1\*</sup>, Muhammad Rapi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Administrasi Publik, Universitas Tadulako, Indonesia

\*E-mail correspondence: [Muhmdalfiann@gmail.com](mailto:Muhmdalfiann@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Bencana alam yang melanda Kota Palu pada tahun 2018 menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan infrastruktur kota. Dalam upaya pemulihan, berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi telah dijalankan oleh pemerintah bersama mitra organisasi kemanusiaan. Namun, efektivitas kebijakan pemulihan ini masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kapabilitas dinamis meliputi kemampuan *sensing*, *seizing*, dan *transforming* diterapkan dalam pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam praktik, hambatan, dan potensi kebijakan pemulihan pasca bencana. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan analisis tematik sebagai teknik pengolahan data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap *sensing*, identifikasi kebutuhan masyarakat masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan data real-time. Pada tahap *seizing*, alokasi sumber daya dan kemitraan strategis belum berjalan efektif akibat hambatan birokratis dan tumpang tindih program antar aktor. Sementara itu, pada tahap *transforming*, pembangunan sistem yang adaptif dan berkelanjutan masih menghadapi tantangan struktural seperti sengketa lahan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kapabilitas dinamis di Kota Palu masih perlu diperkuat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

**Kata kunci:** Bencana; Kapabilitas Dinamis; Rehabilitasi dan Rekonstruksi

### **ARTICLE INFO**

Received April 10, 2025

Revised April 24, 2025

Published May 30, 2025



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Warmadewa University

### **ABSTRACT**

The natural disaster that struck Palu City in 2018 had a significant impact on both the lives of its residents and the city's infrastructure. In response, various rehabilitation and reconstruction programs have been implemented by the government in collaboration with humanitarian organizations. However, the effectiveness of these recovery policies continues to face numerous challenges. This study aims to analyze the extent to which dynamic capabilities comprising sensing, seizing, and transforming have been applied in the management of rehabilitation and reconstruction efforts in Palu City. A qualitative case study approach is employed to explore in depth the practices, obstacles, and potential of post-disaster recovery policies. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, with thematic analysis serving as the primary method of data processing. The findings indicate that in the sensing phase, the identification of community needs remains suboptimal due to weak inter-agency coordination and the lack of real-time data. In the seizing phase, the allocation of resources and

*strategic partnerships has not functioned effectively, hindered by bureaucratic barriers and overlapping programs among stakeholders. Meanwhile, in the transforming phase, the development of adaptive and sustainable systems still faces structural challenges such as land disputes and low community participation. The study concludes that the implementation of dynamic capabilities in Palu City requires further strengthening to ensure a more responsive, efficient, and sustainable recovery process in the face of future disasters.*

**Keywords:** Disaster; Dynamic Capabilities; Rehabilitation and Reconstruction

## 1. PENDAHULUAN

Bencana alam dahsyat yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 merupakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia. Gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter (SR) yang disusul oleh tsunami dan fenomena likuefaksi di beberapa wilayah seperti Petobo, Balaroa, dan Jono Oge, telah memberikan dampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat dan sistem tata kota. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2019), lebih dari 4.340 orang dinyatakan meninggal dunia, 173.000 jiwa terpaksa mengungsi, serta ribuan rumah, jalan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya mengalami kerusakan berat. Selain korban jiwa dan kerusakan fisik, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan nonfisik yang mendalam, seperti trauma psikologis masyarakat, hilangnya mata pencarian, terganggunya roda pemerintahan lokal.

Dampak sistemik ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan rekonstruksi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Kota Palu telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan panjang. Dalam pelaksanaannya, berbagai program pemulihan dilakukan, termasuk pembangunan hunian tetap (huntrap), rehabilitasi fasilitas umum, pemulihan mata pencarian masyarakat, hingga penyusunan regulasi baru terkait zonasi dan mitigasi bencana. Namun, proses pemulihan ini tidak berjalan mulus. Banyak kendala struktural dan teknis yang dihadapi di lapangan. Misalnya, pembangunan huntrap bagi para penyintas menghadapi berbagai hambatan, termasuk persoalan status dan legalitas lahan, konflik dengan pemilik tanah, hingga keterbatasan anggaran dan tenaga kerja.

Selain itu, ditemukan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, NGO, dan masyarakat sipil masih kurang efektif. Situasi ini mencerminkan lemahnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor serta belum optimalnya penggunaan data real-time dalam pengambilan keputusan. Hambatan administratif seperti birokrasi yang panjang, perubahan regulasi, dan keterlambatan dalam pencairan dana bantuan turut memperlambat proses pemulihan.

Upaya percepatan pemulihan pasca bencana yang telah dilakukan tetap patut diapresiasi, namun efektivitasnya masih belum maksimal. Dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mengelola proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendekatan tersebut harus mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemulihan. Tanpa transformasi sistemik dan kapabilitas dinamis yang kuat, proses pemulihan pasca bencana di Kota Palu akan terus menghadapi tantangan struktural yang menghambat upaya menuju ketangguhan jangka panjang.

Salah satu permasalahan utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang terjadi di Kota Palu adalah rendahnya kapasitas organisasi dalam beradaptasi terhadap dinamika kebijakan yang berkembang. Menurut Teece dalam teori *Dynamic Capabilities Theory (DCT)*, organisasi yang memiliki kapabilitas dinamis mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui proses *sensing* (mendeteksi perubahan), *seizing* (mengambil peluang), dan *transforming* (mereformasi strategi dan kebijakan) (Teece, 2012). Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi di Kota Palu mengalami kesulitan dalam menerapkan ketiga aspek tersebut.

Pada tahap *sensing*, organisasi pemerintah dan pemangku kepentingan sering mengalami keterlambatan dalam mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Misalnya, dalam penyediaan Huntap, banyak wilayah yang masih belum mendapat kepastian pembangunan karena permasalahan sengketa lahan (BNPB, 2021). Selain itu, kurangnya sistem pemantauan yang efektif membuat pemerintah kesulitan dalam mendeteksi prioritas rehabilitasi.

Pada tahap *seizing* dalam kerangka *Dynamic Capabilities Theory*, kemampuan suatu organisasi atau pemerintah untuk menangkap peluang dan mengalokasikan sumber daya secara strategis menjadi sangat krusial dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Eisenhardt dan Martin (2000), organisasi yang memiliki kapabilitas dinamis dituntut untuk tidak hanya mengenali peluang yang ada, tetapi juga mampu membangun kemitraan strategis, mengembangkan kebijakan yang fleksibel, dan mengelola sumber daya secara adaptif (Eisenhardt & Martin, 2000). Namun, di Kota Palu, implementasi tahap ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan.

Selain itu, birokrasi yang berbelit menyebabkan keterlambatan realisasi program-program penting. Beberapa informan juga menyoroti lambatnya pencairan dana bantuan dan perubahan kebijakan yang sering terjadi, yang turut memperlambat proses pengambilan keputusan. Tanpa perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan fleksibilitas kebijakan, maka proses pemulihan pasca bencana berpotensi tidak efektif dan berkelanjutan. Pada tahap *seizing*, proses pengalokasian sumber daya dan kolaborasi dengan berbagai aktor tidak berjalan optimal. Studi oleh Eisenhardt & Martin (2000) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki kapabilitas dinamis harus mampu membangun kemitraan strategis dan mengembangkan kebijakan yang fleksibel.

Pada tahap *transforming*, tantangan terbesar adalah membangun sistem kebijakan yang lebih adaptif dan tahan terhadap bencana di masa depan. Banyak kebijakan pasca bencana di Kota Palu yang belum berbasis pada pembelajaran dari kejadian sebelumnya. Misalnya, tidak adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan Huntap, menyebabkan keterlambatan yang berkepanjangan. Selain itu, standar pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana belum sepenuhnya diterapkan, seperti yang dilakukan Jepang setelah gempa Kobe 1995 (Barreto, 2010).

Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kapabilitas dinamis menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pemulihan. Studi oleh Teece (2007) menegaskan bahwa keberhasilan organisasi dalam menghadapi lingkungan yang penuh ketidakpastian sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyesuaikan sumber daya dan strategi dengan kebutuhan yang berubah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kapabilitas *sensing*, *seizing*, dan *transforming* diterapkan dalam pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pemulihan. Dengan memahami bagaimana pemerintah, NGO, dan masyarakat berperan dalam proses ini,

penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan kapabilitas dinamis dalam kebijakan rehabilitasi pasca bencana di Indonesia, terutama dalam konteks pasca bencana. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana kapabilitas dinamis dapat digunakan sebagai pendekatan strategis dalam pemulihan pasca bencana.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kapabilitas dinamis dalam pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kapabilitas dinamis organisasi dalam menangani tantangan pasca bencana, termasuk koordinasi lintas aktor dan sengketa lahan.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu strategi pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, perwakilan BNPB dan BPBD, NGO dan organisasi internasional, serta tokoh masyarakat dan warga terdampak. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan memiliki kedalaman analisis yang kuat (Miles et al., 2014). Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai titik jenuh data, yaitu ketika tidak ada informasi baru yang diperoleh.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik (Bryman, 2016). Observasi dilakukan untuk memahami implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, khususnya dalam konteks koordinasi dan sengketa lahan. Dokumentasi melengkapi data dari wawancara dan observasi dengan bukti tertulis dari laporan pemerintah, kebijakan resmi, serta publikasi ilmiah.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik yang melibatkan beberapa tahap, yaitu reduksi data, koding dan kategorisasi, serta interpretasi temuan (Braun & Clarke, 2006). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan agar lebih terstruktur (Miles et al., 2014). Selanjutnya, proses koding dilakukan secara induktif dan deduktif berdasarkan pola yang ditemukan serta kerangka *Dynamic Capabilities Theory* (Teece, 2018). Tahap akhir adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai kapabilitas dinamis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi Kota Palu.

### **3. RESULTS AND DISCUSSIONS**

#### ***Sensing***

*Dynamic Capabilities Theory (DCT)* yang dikembangkan oleh Teece, menekankan bahwa keberlanjutan dan daya saing organisasi bergantung pada kemampuannya dalam sensing (mendeteksi peluang dan ancaman), seizing (mengambil peluang dan mengalokasikan sumber daya), serta transforming (mengubah dan mengadaptasi diri terhadap lingkungan yang dinamis) (Ambrosini & Bowman, 2009). Dalam konteks kebencanaan, teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu pasca gempa bumi dan tsunami 2018. Dalam beberapa studi menunjukkan bahwa deteksi kebutuhan ini sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan data *real-time* (Teece, 2018).

Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, kapabilitas *sensing* memegang peran penting sebagai tahap awal dalam proses manajemen pemulihan. *Sensing* mengacu pada kemampuan aktor-aktor, khususnya pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait, untuk mendeteksi secara dini kebutuhan masyarakat terdampak, memahami prioritas pemulihan, serta mengidentifikasi potensi hambatan dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan data sekunder dari berbagai dokumen kebijakan dan laporan kegiatan pasca bencana, asesmen kebutuhan dilakukan pada fase awal oleh BPBD Kota Palu, Dinas Sosial, serta sejumlah LSM mitra, baik lokal maupun internasional. Fokus asesmen tersebut mencakup kerusakan fisik infrastruktur, kebutuhan hunian sementara dan tetap, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.

Namun, jika ditelusuri lebih jauh melalui data primer berupa wawancara dengan pejabat BPBD Kota Palu dan perwakilan NGO lokal, ditemukan adanya kesenjangan dalam proses deteksi kebutuhan. Beberapa informan menyebutkan bahwa proses pemetaan kebutuhan cenderung bersifat top-down. Informasi dari lapangan banyak bergantung pada laporan instansi dan mitra, bukan berdasarkan penggalian aspirasi langsung dari kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidaksesuaian antara bantuan yang disediakan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus ditemukan distribusi logistik yang tidak merata dan pembangunan fasilitas umum yang tidak mempertimbangkan konteks lokal serta ramah bagi kelompok rentan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kapabilitas *sensing* di Kota Palu belum sepenuhnya adaptif dan responsif, dan masih memerlukan penguatan dalam hal koordinasi lintas aktor, integrasi data spasial real-time, serta pendekatan partisipatif yang lebih inklusif.

Beberapa informan menyebutkan bahwa terdapat "ketimpangan antara kebutuhan lapangan dan bantuan yang datang." Selain itu, kurangnya integrasi data antarinstansi membuat pemetaan kebutuhan menjadi lambat dan tidak akurat. Beberapa bantuan seperti air bersih misalnya, sangat sulit diperoleh pada awal adanya hunian sementara. Dalam beberapa kasus juga sering terjadi banyak program bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan (Barreto, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas *sensing* masih menghadapi kendala serius dalam hal koordinasi dan pelibatan masyarakat, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan aktual di lapangan.

### ***Seizing***

*Seizing* dalam DCT berkaitan dengan bagaimana organisasi atau pemerintah menangkap peluang dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pemulihan pasca bencana (Teece, 2007). Studi menunjukkan bahwa efektivitas *seizing* dalam rehabilitasi Palu bergantung pada tata kelola yang adaptif dan responsif. Namun, dalam implementasinya, alokasi dana bantuan dan sumber daya sering kali menghadapi kendala birokrasi (Constance et al., 2007). Seperti pada kota Palu, dimana beberapa program yang diterapkan, seperti pembangunan hunian tetap (huntrap) dan perbaikan infrastruktur, mengalami keterlambatan akibat masalah administratif dan hambatan regulasi.

Dalam konteks Kota Palu, implementasi *seizing* menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Berdasarkan data primer dari wawancara mendalam dengan beberapa informan dari BPBD, Dinas Perumahan, dan perwakilan masyarakat, disebutkan bahwa proses pembangunan hunian tetap (huntrap) mengalami keterlambatan yang cukup panjang. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh birokrasi pengadaan dan pengurusan lahan yang sangat rumit serta konflik lahan yang belum terselesaikan antar berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dan pemerintah. Salah satu informan menyebutkan, "Proses pembangunan lama karena birokrasi lahan yang rumit dan sering terjadinya konflik lahan," yang menunjukkan lemahnya kapasitas pemerintah dalam menangkap peluang pembangunan secara efektif.

Lebih lanjut, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa alokasi bantuan belum merata. Masih terdapat penyintas yang tinggal di hunian sementara dengan kondisi yang tidak layak, bahkan hingga beberapa tahun setelah bencana terjadi. Data sekunder dari laporan kemanusiaan juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan dan inkonsistensi dalam mekanisme implementasi program. Hambatan koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih regulasi memperlambat pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, peluang kolaborasi dengan sektor swasta dan bantuan internasional yang seharusnya dapat mempercepat proses pemulihan, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Situasi ini mengindikasikan lemahnya *seizing capacity*, yakni ketidakmampuan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan merespons peluang pemulihan yang potensial secara adaptif dan inklusif.

### ***Transforming***

Kapabilitas *transforming* berfokus pada adaptasi dan inovasi dalam menghadapi lingkungan yang berubah setelah bencana. Kota Palu menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali sistem sosial dan ekonomi yang lebih tangguh. Pendekatan berbasis komunitas serta penerapan teknologi dalam rekonstruksi menjadi aspek penting dalam transformasi ini (Zollo & Winter, 2002).

Di Kota Palu, proses transformasi pasca bencana 2018 mencakup berbagai upaya, seperti restrukturisasi sistem sosial, penguatan kelembagaan lokal, serta penerapan teknologi dalam pemulihan ekonomi dan rekonstruksi infrastruktur. Namun, berdasarkan data primer dari wawancara dengan masyarakat terdampak dan perwakilan LSM lokal, terlihat bahwa banyak program transformasi tidak dirancang untuk berkelanjutan. Salah satu informan menyatakan, "Setelah bantuan berakhir, masyarakat kembali ke kondisi sebelum bencana karena tidak ada pendampingan lanjutan." Hal ini menunjukkan bahwa banyak intervensi bersifat reaktif, bukan strategis jangka panjang.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam proses transformasi juga dinilai rendah. Pelatihan kewirausahaan, pendidikan kebencanaan, serta pembangunan kapasitas ekonomi lokal belum dijalankan secara merata. Ketergantungan pada bantuan eksternal semakin

memperlemah kemandirian komunitas, dan kurangnya mekanisme transisi dari bantuan ke pemulihan mandiri menjadi penghambat utama dalam membangun ketangguhan masyarakat. Dari sisi kelembagaan, adaptasi birokrasi terhadap kondisi pasca bencana berjalan lambat. Beberapa perangkat daerah belum memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan untuk mengelola program berbasis mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa peristiwa bencana berskala besar merupakan pengalaman baru bagi Kota Palu, sehingga proses pembelajaran dan penyesuaian masih berlangsung. Akibatnya, upaya transformasi struktural dan sosial belum sepenuhnya berhasil menciptakan sistem yang tangguh terhadap bencana masa depan. Kota Palu memerlukan strategi transformatif yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang agar dapat menghadapi tantangan multidimensional secara adaptif.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan analisis DCT, penerapan kapabilitas *sensing*, *seizing*, dan *transforming* dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu masih menghadapi beberapa kendala yang kompleks dan saling terkait.

Pertama, dalam aspek *sensing*, proses identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak masih belum sistematis dan sering kali dilakukan secara reaktif. Kurangnya penggunaan data spasial dan teknologi informasi menyebabkan banyak kebutuhan mendesak tidak terdeteksi secara akurat, sehingga menghambat perencanaan yang berbasis bukti. Akibatnya, intervensi bantuan menjadi kurang tepat sasaran dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kedua, dalam aspek *seizing*, kendala birokrasi menjadi hambatan utama dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Proses pengambilan keputusan sering kali terhambat oleh hierarki administratif, konflik regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya koordinasi antar aktor kebencanaan. Banyak inisiatif pemulihan yang mengalami keterlambatan karena rumitnya proses pengadaan, serta minimnya mekanisme distribusi bantuan yang transparan dan partisipatif.

Ketiga, dalam aspek *transforming*, proses pemulihan belum sepenuhnya mengarah pada perubahan struktural menuju ketahanan jangka panjang. Upaya transformasi masih bersifat simbolik dan tidak mengakar pada penguatan kapasitas lokal. Rendahnya pelibatan masyarakat, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta kurangnya integrasi teknologi inovatif menghambat terwujudnya sistem sosial dan ekonomi yang lebih resilien. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan adaptif dalam setiap tahap rehabilitasi dan rekonstruksi guna memperkuat ketiga kapabilitas tersebut. Hal ini akan mendorong proses pemulihan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan.

#### **5. REFERENSI**

- Ambrosini, V., & Bowman, C. (2009). What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management? *International Journal of Management Reviews*, 11(1), 29–49. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00251.x>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2019). Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026. Eprints UMS+2inarisk.bnrb.go.id+2Bappeda Kota Palu+2

- Barreto, I. (2010). Dynamic Capabilities: A review of past research and an agenda for the future. In *Journal of Management* (Vol. 36, Issue 1, pp. 256–280). <https://doi.org/10.1177/0149206309350776>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*.
- Bryman, Alan. (2016). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Constance, H., Sydney, F., Will, M., Margaret Peteraf, Harbir Singh, David Teece, & Sidney Winter. (2007). *Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations*.
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). DYNAMIC CAPABILITIES: WHAT ARE THEY? In *Strategic Management Journal Strat. Mgmt. J* (Vol. 21).
- Miles, M., A, M. H., & Johnny, S. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed) (3rd ed., Vol. 3).
- Patton. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (Vol. 4). Sage Publications.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Teece, D. J. (2012). Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action. In *Journal of Management Studies* (Vol. 49, Issue 8, pp. 1395–1401). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01080.x>
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007>
- Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. *Organization Science*, 13(3), 339–351. <https://doi.org/10.1287/orsc.13.3.339.2780>